

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI STRATEGI UMKM NAIK KELAS UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Muhammad Busthomi¹, Neneng Sri Rahayu², Hamka³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

busthomi751207@gmail.com¹, nenengsriahayu@stialan.ac.id²
laiccahamka@gmail.com³

Abstract

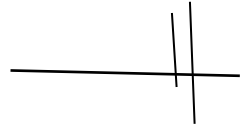
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in North Minahasa are vital to the local economy, providing jobs and ensuring social and economic stability. With 4,170 active units and the designation of Likupang as a priority tourism destination, the sector has enormous potential to grow in tourism, culinary, and crafts.

However, these MSMEs face significant challenges. Limited access to formal financing is a major hurdle, forcing many to rely on high-interest informal loans due to strict bank requirements. A lack of financial and managerial literacy further complicates this, preventing proper bookkeeping and business planning, and thus hindering access to formal credit. Other key issues include low digital adoption and limited market access. Most businesses only use basic social media for marketing, with poor digital literacy and infrastructure as hindrances. Additionally, a lack of product certification, quality standards, and proper branding makes it difficult to enter modern markets. The absence of a strong business ecosystem and partnerships also leaves MSMEs without the collaborative support needed to compete effectively. These challenges are interconnected, from a lack of financial literacy preventing loan access to poor product quality hindering partnerships.

The methodology used in this study involves a literature review and an analysis of the 2024 Regional Competitiveness Index (RCI) data. The RCI is a crucial instrument developed by the National Research and Innovation Agency (BRIN) to measure competitiveness at the provincial and regency/city levels. It provides a comprehensive evaluation of regional productivity by adopting the framework of the 2019 Global Competitiveness Index (GCI) from the World Economic Forum (WEF). This framework has been carefully adapted to fit the specific context and characteristics of Indonesia's regions. This approach ensures a robust and relevant assessment of local economic dynamics.

The findings of this study show that the North Minahasa Regency Government needs to implement a holistic, collaborative, and inclusive policy strategy. This approach should focus on several key areas. First, it is crucial to expand access to financing through innovative and more flexible schemes, while also building business capacity through structured training supported by universities and other institutions. Second, digital transformation must be promoted, along with product diversification, certification, and integration into local e-catalogs and existing e-commerce platforms. Finally, strengthening the ecosystem is essential, which can be achieved by establishing business incubation centers, creating an integrated data system across local government agencies, and empowering women and local communities.

Keywords: Policy strategy, Inclusive financing, Financial literacy, MSME digitalization, Market access expansion



Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa Utara memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi rakyat, penyedia lapangan kerja, serta penopang stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi lokal. Saat ini tercatat sebanyak 4.170 unit industri mikro dan kecil (IMK) yang aktif beroperasi di Minahasa Utara. Sektor ini memiliki potensi besar, terlebih dengan penetapan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional yang semakin membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dari sektor pariwisata hingga kuliner.

Meski potensinya besar, UMKM di Minahasa Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses pembiayaan membuat banyak pelaku usaha mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi, karena persyaratan agunan dan kelengkapan administrasi perbankan sulit dipenuhi. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan dan kapasitas manajerial juga menjadi masalah mendasar, terlihat dari lemahnya pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan pemisahan keuangan pribadi dengan usaha. Hal ini bukan hanya menghambat pengelolaan sehari-hari, tetapi juga menutup akses terhadap pembiayaan formal. Tantangan lain muncul dari rendahnya adopsi digital. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan media sosial secara sederhana untuk pemasaran, tanpa strategi promosi yang lebih terarah, sementara keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan serta rendahnya literasi digital memperparah kondisi ini.

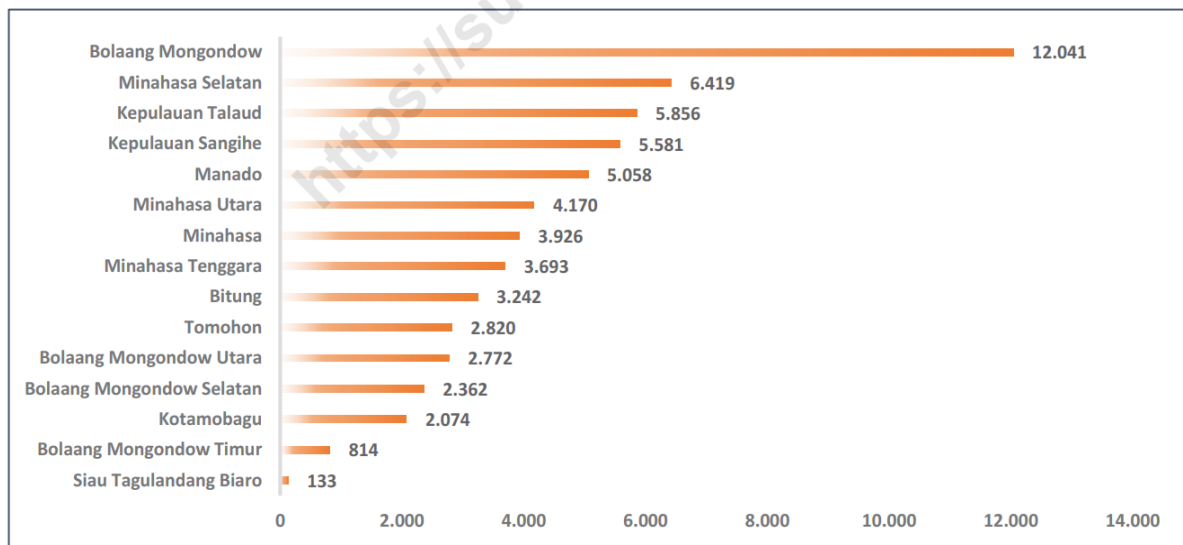
Metodologi yang digunakan dalam kajian ini dengan studi literatur dan telaah data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang komprehensif dan merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia.

Hasil dari kajian ini adalah diperlukannya strategi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang holistik, kolaboratif, dan inklusif dalam: 1) Akses pembiayaan diperluas melalui skema yang inovatif dan lebih fleksibel, sementara peningkatan kapasitas usaha perlu ditempuh melalui pelatihan terstruktur dengan dukungan dari perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan lainnya, 2) Transformasi digital harus didorong bersamaan dengan diversifikasi produk, sertifikasi, dan integrasi baik ke dalam e-katalog daerah, 3) Penguatan ekosistem melalui pembentukan pusat inkubasi, sistem data terpadu lintas OPD, serta pemberdayaan perempuan dan komunitas lokal menjadi sangat penting.

Kata kunci: Strategi kebijakan, Pembiayaan inklusif, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, Perluasan akses pasar

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa Utara memainkan peran penting sebagai pilar ekonomi rakyat. Sektor ini tidak hanya memiliki peluang untuk menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi lokal. Berdasarkan data BPS, terdapat 4.170 unit industri mikro dan kecil (IMK) yang aktif beroperasi di Minahasa Utara, jauh dibawah kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki 12.041 unit IMK (BPS, 2024). Hal ini memperlihatkan betapa strategisnya posisi UMKM dalam perekonomian daerah.



Gambar 1. Sebaran Usaha/Perusahaan IMK menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tahun 2023

Sumber: BPS, 2024

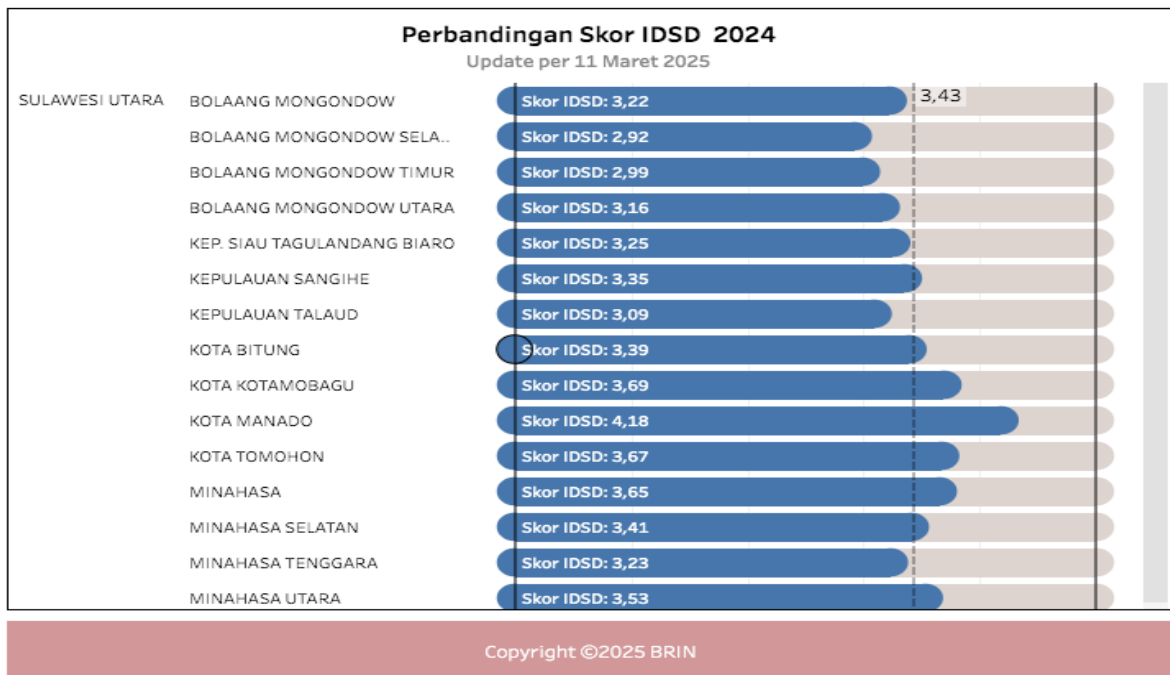
Di tengah dinamika pembangunan nasional, UMKM di Minahasa Utara menghadapi situasi yang khas. Karakteristik geografis pulau Sulawesi, kekayaan sumber daya alam, serta keanekaragaman budaya menjadi potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Selain itu, penetapan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional membuka peluang baru bagi UMKM di Minahasa Utara untuk masuk ke rantai pasok industri pariwisata, mulai dari produk kuliner, kerajinan, hingga jasa pendukung lain (RRI, 2024). Dengan demikian, UMKM Minahasa Utara memiliki basis yang kuat untuk berkembang jika didukung oleh kebijakan yang tepat terkait pembiayaan, pemberdayaan, dan pemasaran produk.

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan. Meskipun UMKM di Minahasa Utara mampu menyerap tenaga kerja hingga 7.375 orang, jumlah ini masih jauh dari kata ideal jika memperhatikan fakta bahwa UMKM menjadi pilar ekonomi Masyarakat (BPS, 2024). Selain itu, banyak pelaku UMKM yang masih beroperasi dalam skala mikro dengan keterbatasan modal, teknologi, serta literasi keuangan. Mayoritas usaha masih bersifat informal, tidak berbadan hukum, dan mengandalkan modal pribadi sebagai sumber pembiayaan (BPS, 2024). Kondisi ini menjadikan UMKM sulit menjangkau akses permodalan formal, memperluas pasar, atau melakukan ekspansi usaha. Padahal, dalam jangka panjang, stagnansi ini dapat mengurangi kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten.

Selain faktor internal, UMKM di Minahasa Utara juga dihadapkan pada tantangan struktural. Sistem pembiayaan daerah yang masih rendah terlihat dari skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pilar 9 (sistem keuangan) yang hanya mencapai 1,47. Skor ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara. Hal ini memperlihatkan keterbatasan sistem keuangan daerah dalam mendukung UMKM. Akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun masih minim, tercermin dari rendahnya jumlah UMKM yang memperoleh pinjaman perbankan. Hambatan administratif seperti persyaratan agunan dan legalitas usaha membuat sebagian besar pelaku usaha bergantung pada modal pribadi atau pembiayaan informal dengan risiko tinggi.



Gambar 2. Perbandingan Skor IDSD Pilar 9 Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara
Sumber: BRIN, 2025



Gambar 3. Perbandingan Skor IDSD Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: BRIN, 2025

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang sekaligus tantangan. Tingkat pemanfaatan internet oleh UMKM di Minahasa Utara masih rendah dan hanya terbatas pada promosi sederhana melalui media sosial. Padahal, digitalisasi dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta membuka akses ke pembiayaan berbasis digital. Minimnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan, dan kurangnya pendampingan membuat banyak UMKM kesulitan untuk mengadopsi teknologi baru.

Lebih jauh, minimnya jejaring kemitraan dan inkubasi bisnis memperparah situasi. Tidak ada UMKM yang tercatat menjalin kemitraan formal dengan usaha lain, baik dalam hal pemasaran, promosi, bahan baku, maupun distribusi (BPS, 2024). Hal ini membuat UMKM di Minahasa Utara berjalan tidak beriringan, tanpa dukungan ekosistem yang dapat memperkuat daya saing. Akibatnya, potensi kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, maupun pemerintah belum tergarap secara optimal.

Dengan melihat realitas tersebut, jelas bahwa UMKM Minahasa Utara membutuhkan strategi kebijakan yang komprehensif untuk menjawab tantangan dan memaksimalkan potensi. Pendekatan yang diambil harus menyasar penguatan kapasitas internal pelaku usaha, penyediaan akses pembiayaan inklusif, percepatan digitalisasi, diversifikasi produk dan rantai pasok, serta pembangunan ekosistem kemitraan yang berkelanjutan. Harapannya UMKM dapat naik kelas, berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Daya saing daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, tata



kelola pemerintahan, serta kapasitas pelaku usaha dalam menghasilkan produk dan jasa yang mampu bersaing di pasar regional maupun global.

Menurut teori pembangunan wilayah, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan daya saing menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kabupaten Minahasa Utara memiliki berbagai sektor unggulan yang berpotensi menjadi penggerak daya saing daerah, seperti sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pariwisata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut termasuk sektor basis dan memiliki keunggulan kompetitif dalam perekonomian daerah.

Konsep UMKM Naik Kelas

UMKM naik kelas merupakan proses transformasi usaha dari skala mikro menuju usaha kecil, dari usaha kecil menuju usaha menengah, atau peningkatan kualitas usaha yang ditandai oleh peningkatan omzet, produktivitas, kapasitas produksi, kualitas produk, legalitas usaha, penggunaan teknologi, serta perluasan pasar. Konsep UMKM naik kelas tidak hanya berorientasi pada peningkatan skala usaha, tetapi juga pada peningkatan daya saing. UMKM yang naik kelas umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki legalitas usaha yang lengkap.
2. Menggunakan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran.
3. Memiliki akses pembiayaan yang lebih luas.
4. Menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu.
5. Mampu memasuki pasar regional maupun nasional.
6. Memiliki manajemen usaha yang lebih profesional.

Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta pariwisata. Hasil analisis sektor basis menunjukkan bahwa beberapa sektor unggulan daerah memiliki daya saing yang kuat dan berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan inovasi daerah juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam konteks tersebut, strategi UMKM naik kelas menjadi sangat relevan untuk memperkuat keterkaitan antara sektor unggulan daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pasar, inovasi produk, dan digitalisasi, UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara.

Hubungan UMKM Naik Kelas dengan Daya Saing Daerah

Teori ekonomi regional menjelaskan bahwa peningkatan daya saing daerah sangat dipengaruhi oleh produktivitas pelaku ekonomi lokal. UMKM yang naik kelas mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat basis ekonomi daerah. Dengan demikian, semakin banyak UMKM yang berhasil naik kelas, semakin kuat pula daya saing ekonomi daerah yang terbentuk.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan meliputi investasi, tenaga kerja, teknologi, kewirausahaan, dan



produktivitas. UMKM menjadi salah satu aktor utama dalam proses tersebut karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lokal. Penelitian mengenai struktur ekonomi Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa merupakan sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini dengan wawancara/diskusi dengan BRIDA Kabupaten Minahasa Utara, serta studi literatur dan telaah data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024. Kemudian dilakukan analisis data kajian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif.

IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kondisi UMKM di Minahasa Utara perlu dilakukan dengan pendekatan multidimensi yang menyoroti interaksi antara aspek struktural, teknis, sosial, dan kelembagaan. UMKM tidak bisa dilihat hanya dari jumlah unit usaha atau kontribusinya terhadap tenaga kerja. Hal yang jauh lebih penting adalah kualitas, daya saing, serta keterhubungan UMKM ke dalam rantai nilai regional maupun nasional. Pada tataran makro, UMKM memiliki potensi untuk menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan pilar ekonomi rumah tangga. Namun, pada tataran mikro, banyak pelaku usaha masih beroperasi dengan cara tradisional, skala kecil, dan menghadapi hambatan yang menghalangi pertumbuhan. Bagian ini akan membedah secara mendalam lima dimensi utama tantangan dan peluang yang ada: pembiayaan, literasi keuangan dan kapasitas manajerial, digitalisasi, akses pasar dan diversifikasi produk, serta kemitraan dan inkubasi.

Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Tantangan UMKM Naik Kelas

Permasalahan pembiayaan menjadi titik awal yang paling krusial. Akses UMKM terhadap sumber modal formal masih sangat rendah, dengan skor IDSD 2024 terhadap akses KUR di Minahasa Utara hanya mencapai 1,93 (BRIN, 2025). Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM kesulitan memasuki sistem keuangan formal karena berbagai macam factor persyaratan pengajuan kredit yang belum mampu mereka penuhi. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki agunan, badan hukum, atau laporan keuangan terstandar. Bank sebagai penyalur program KUR pun akan selektif dan mengikuti prosedur yang profesional untuk mengurangi resiko keterlambatan maupun gagal bayar dari para kreditur UMKM (Najooan et al., 2022). Kondisi ini membuat bank enggan mengambil risiko, sementara pelaku UMKM tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan pembiayaan informal maupun modal pribadi. Pinjaman dari keluarga, koperasi non-formal, bahkan rentenir dengan bunga tinggi menjadi hal yang harus diwaspadai baik bagi unit usaha UMKM maupun pemerintah daerah karena berpotensi menciptakan beban arus kas besar. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada pembiayaan informal dan modal pribadi ini menghambat ekspansi usaha dan memaksa mereka bertahan dalam skala mikro.

Lebih jauh, hambatan pembiayaan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga masalah biaya transaksi yang tinggi. Proses pengajuan kredit yang belum familiar bagi para pelaku UMKM, waktu yang panjang, serta kurangnya pendampingan membuat banyak pelaku usaha memilih untuk tidak mencoba mengakses pembiayaan formal. Hal ini tercermin melalui data BPS bahwa hanya 144 unit UMKM di Kabupaten Minahasa Utara yang berhasil mendapatkan bantuan perbankan (BPS, 2024). Bahkan program pemerintah seperti KUR seringkali tidak sampai ke kelompok sasaran karena sosialisasi yang harus terus digalakkan dari bank penyalur KUR dan syarat administrasi yang belum mampu dipenuhi oleh mayoritas unit UMKM seperti tercermin oleh Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) cabang Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara (Gonta *et al.*, 2023). Hal ini menimbulkan kesenjangan besar antara kebijakan di atas kertas dan implementasi di lapangan. Solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah melalui pendekatan inovatif seperti penetapan kredit berbasis cash flow, pelatihan pembukuan keuangan baik oleh bank maupun pemerintah daerah, membuat sistem semacam credit scoring digital bagi bank daerah, sosialisasi pembiayaan KUR sampai ke daerah terpencil, hingga penyederhanaan proses administrasi KUR. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan risiko lembaga keuangan dapat diminimalkan, sementara UMKM memperoleh akses modal yang lebih mudah dan cepat.

Selain itu, integrasi lembaga keuangan non-bank dalam ekosistem pembiayaan UMKM seperti KUR menjadi sangat penting. Koperasi, BPR, dan fintech lending memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional dalam menilai kelayakan usaha mikro serta menjadi penyalur dana program KUR. Jika difasilitasi dengan regulasi yang tepat, lembaga-lembaga ini dapat menjadi katalis penting dalam menyalurkan modal ke sektor UMKM yang produktif dan potensial. Pemerintah daerah juga dapat mendorong terciptanya dana bergulir bersyarat lunak yang dapat disalurkan melalui koperasi atau BUMD untuk memperkuat likuiditas UMKM. Langkah ini bukan hanya soal akses pembiayaan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

Literasi keuangan dan kapasitas manajerial menjadi dimensi kedua yang tak kalah penting. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pencatatan keuangan membuat mereka tidak mampu menunjukkan kelayakan usaha kepada lembaga keuangan. Lemahnya pencatatan keuangan menyebabkan banyak pelaku usaha yang kurang akurat dalam menghitung biaya operasional sehari-hari seperti harga pokok produksi, margin keuntungan, atau break-even point dengan benar. Akibatnya tidak akurat dalam penghitungan biaya produksi dll, unit UMKM seringkali menetapkan harga yang kurang kompetitif dan berisiko tinggi untuk merugi. Minimnya pencatatan juga membuat UMKM sulit merencanakan ekspansi usaha atau mengantisipasi risiko keuangan.

Manajemen usaha yang lemah akibat rendahnya literasi keuangan bisa berdampak lebih luas, tidak hanya pada keuangan, tetapi juga pada aspek produksi, pemasaran, promosi, dan inovasi. Banyak UMKM masih mengandalkan pengalaman pribadi dan keluarga tanpa struktur organisasi yang jelas. Hal ini membatasi kemampuan adaptasi mereka terhadap dinamika pasar dan perkembangan serta adopsi teknologi. Tanpa intervensi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, UMKM akan sulit naik kelas dan berdaya saing di tingkat regional hingga nasional. Oleh karena itu, program literasi keuangan harus dirancang secara modular dengan pendekatan praktik langsung, bukan hanya seminar sesaat. Pelaku UMKM perlu dilatih untuk membuat laporan keuangan sederhana, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengelola arus kas secara lebih profesional.

Lebih jauh, peningkatan kapasitas manajerial harus melibatkan lembaga pendidikan dan pelatihan. Universitas, sekolah menengah kejuruan, serta lembaga

pelatihan swasta dapat menjadi mitra dalam memberikan pendampingan yang lebih terstruktur. Model kolaborasi ini sudah terbukti berhasil di beberapa daerah, di mana pelatihan terpadu berbasis kurikulum modular mampu meningkatkan keterampilan dasar akuntansi dan perencanaan bisnis pelaku UMKM. Literasi keuangan juga dapat dipadukan dengan literasi digital melalui penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana seperti Ms. Excel maupun aplikasi sejenis. Dengan pendekatan ini, UMKM dapat membangun kredibilitas yang lebih tinggi di mata lembaga keuangan sekaligus memperbaiki tata kelola usaha mereka. Hal ini yang coba dibenahi oleh mahasiswa dan universitas di Sulawesi Utara. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Bina Taruna Gorontalo dan Politeknik Negeri Manado telah memberikan pelatihan kepada BUMDes dan UMKM. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan literasi keuangan dan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel bagi mitra UMKM di Desa Wori dan Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara (*Manullang et al., 2025; Robot, 2024*). Kegiatan seperti ini menjadi preseden baik bagi upaya peningkatan literasi keuangan bagi UMKM di Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan universitas untuk mereplikasi kegiatan serupa, melakukan sosialisasi, dan mengadakan pelatihan yang lebih luas.

Transformasi digital menjadi dimensi ketiga yang sarat peluang sekaligus tantangan.

Saat ini, pemanfaatan internet oleh UMKM di Minahasa Utara masih terbatas pada aspek pemasaran dan promosi sederhana melalui media sosial dan belum berfokus pada aspek promosi (*BPS, 2024*). Padahal, digitalisasi dapat dimanfaatkan jauh lebih luas: mulai dari manajemen stok produk, pencatatan keuangan, sistem pembayaran digital, hingga akses ke pasar e-commerce. Rendahnya literasi digital membuat banyak UMKM hanya melihat internet sebagai alat tambahan, bukan instrumen utama untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Hambatan infrastruktur juga signifikan, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.

Namun, peluang digitalisasi tidak boleh diabaikan. Pengembangan kapasitas digitalisasi UMKM terus digalakkan melalui pelatihan dan praktik pemasaran dan promosi digital. Contohnya, pelatihan pemasaran dan promosi digital telah diberikan kepada usaha kos di Airmadidi, Desa Wisata Budo, dan pelaku UMKM di Desa Wori, yang semuanya berada di Minahasa Utara (*Anggreynia et al., 2024; Onibala et al., 2025; Tirayoh et al., 2024*). Proses pelatihan dan penerapan *digital marketing* ini tentu saja akan membawa hasil positif jika secara konsisten dilakukan oleh pelaku usaha. Seperti yang terjadi di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, *digital marketing*, kualitas produk dan harga jual produk berpengaruh positif terhadap Keputusan pembelian dari konsumen (*Ponomban et al., 2023*).

Jangkauan pasar baik lokal, regional, hingga nasional akan lebih terbuka jika pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Produk UMKM daerah dapat diintegrasikan dengan e-katalog pemerintah daerah sehingga membuka peluang baru dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, kemitraan dengan penyedia jasa teknologi lokal dapat mempercepat adopsi layanan digital, mulai dari sistem pembayaran non-tunai hingga pemasaran dan promosi berbasis data. Program pelatihan digital juga perlu diarahkan pada keterampilan praktis seperti penggunaan WhatsApp Business, Instagram Ads, atau TikTok Shop, sehingga pelaku usaha dapat langsung merasakan manfaat dari digitalisasi secara nyata.

Lebih jauh, insentif seperti subsidi data atau pelatihan gratis dari pemerintah daerah dapat mempercepat proses transformasi digital. Pelatihan *digital marketing* yang sudah dilakukan oleh banyak universitas seperti yang dicontohkan sebelumnya bisa menjadi titik awal bagi pemerintah daerah untuk mereplikasi kegiatan dan menggandeng universitas untuk melakukan pelatihan serupa. Intervensi sederhana seperti menyediakan



paket data khusus UMKM dapat mendorong adopsi teknologi secara signifikan. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, serta membuka pasar baru bagi UMKM. Dalam jangka panjang, transformasi digital juga dapat memperkuat sistem credit scoring berbasis data transaksi, sehingga UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan formal.

Keterbatasan akses pasar menjadi dimensi keempat yang sangat menentukan. Produk UMKM di Minahasa Utara sebagian besar hanya beredar di pasar lokal dengan skala konsumen terbatas. Minimnya sertifikasi seperti BPOM, halal, atau SNI menjadi hambatan utama untuk masuk ke pasar modern. Sertifikasi halal dsb memiliki efek positif terhadap pembeli karena labelisasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk UMKM sehingga memiliki dampak signifikan terhadap usaha UMKM (Fitri, 2024; Kristin et al., 2024). Rendahnya kualitas kemasan dan standar mutu juga menurunkan daya tarik produk di mata konsumen. Akibatnya, banyak produk UMKM hanya dipasarkan sebagai barang mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah yang rendah. Padahal, potensi besar ada pada produk turunan seperti VCO, bumbu instan, kerajinan rumah tangga, hingga makanan olahan berbasis hasil laut.

Diversifikasi produk menjadi strategi penting untuk memperluas pasar. Diversifikasi dan diferensiasi produk berkaitan erat dengan peningkatan omset penjualan sehingga insentif diterima oleh pelaku UMKM secara langsung (Khairani and Pratiwi, 2018). Di sisi lain untuk mendorong upaya UMKM naik kelas, pemerintah daerah dapat mendukung dengan membangun rumah produksi bersama, fasilitas pengemasan modern, dan penyediaan alat teknologi tepat guna. Sertifikasi kolektif juga dapat didorong untuk menekan biaya dan mempercepat proses. Praktik baik dari daerah lain, seperti fasilitasi sertifikasi halal kolektif oleh Bank Indonesia di Manado, dapat dijadikan model untuk Minahasa Utara (Kementerian Sekretariat Negara, 2024). Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya mampu memperluas pasar regional, tetapi juga berpeluang besar menembus pasar ekspor.

Namun, diversifikasi produk tidak cukup tanpa adanya strategi pemasaran yang kuat. Pelaku UMKM perlu diajarkan untuk memahami segmentasi pasar, strategi branding, serta penggunaan saluran distribusi modern. Program diversifikasi produk UMKM bisa disandingkan dengan pelatihan pemasaran dan promosi dengan menekankan pada praktik langsung, seperti simulasi penjualan di marketplace atau pengembangan konten promosi digital. Dengan demikian, UMKM dapat membangun citra produk yang lebih profesional dan kompetitif.

Minimnya kemitraan dan inkubasi bisnis menjadi dimensi kelima yang memperlambat perkembangan UMKM. Data BPS menunjukkan bahwa tidak ada UMKM di Minahasa Utara yang menjalin kemitraan formal dengan pihak lain (BPS, 2024). Kondisi ini mencerminkan lemahnya ekosistem usaha yang seharusnya mendukung pertumbuhan bersama. Padahal, kemitraan strategis antar sektor industri dan antar Lembaga seperti pemerintah, BUMN, maupun swasta dapat membuka peluang pasar baru, memastikan keberlanjutan produksi, dan menciptakan kontrak jangka panjang.

Pusat inkubasi berbasis sektor menjadi solusi strategis yang dapat memperkuat ekosistem ini. Inkubasi tidak hanya menyediakan pelatihan teknis, tetapi juga mentoring bisnis, ruang produksi bersama, hingga fasilitasi akses pasar. Pusat inkubasi bisnis inkubasi pun bisa menyasar factor-faktor yang didiskusikan sebelumnya. Selain menyediakan dana, pusat inkubasi bisnis bisa menyediakan praktik baik untuk UMKM seperti pelatihan tentang laporan keuangan, packaging, brand, pemasaran dan promosi, serta digitalisasi (Subardjo and Rahmawati, 2022).

Untuk aspek pemasaran, model kemitraan off-taker dengan hotel dan restoran di daerah wisata seperti Likupang dapat menjadi pintu masuk bagi produk lokal ke rantai



pasok pariwisata. Selain itu, kerja sama antardaerah juga dapat memperluas pasar, misalnya dengan menyuplai produk setengah jadi ke daerah lain atau memanfaatkan pelabuhan Bitung sebagai hub ekspor kolektif.

Kemitraan juga harus diperluas ke sektor akademisi dan komunitas lokal. Selain melakukan pengabdian Masyarakat untuk membantu peningkatan kapasitas UMKM lokal, universitas dapat menyediakan hasil riset dan inovasi untuk produk UMKM, sementara komunitas lokal dapat menjadi saluran distribusi sekaligus agen promosi. Dengan membangun jejaring kemitraan yang luas, UMKM Minahasa Utara dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar kualitas, dan memperluas pasar secara berkelanjutan.

Strategi Percepatan UMKM Naik Kelas

Selain lima dimensi utama tersebut, faktor sosial dan budaya juga memengaruhi dinamika UMKM. Dari sisi gender, peran perempuan dalam UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagian besar usaha kuliner, kriya, hingga perdagangan kecil dikelola oleh perempuan, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung rumah tangga. Namun, perempuan menghadapi tantangan ganda berupa akses modal yang lebih sulit, keterbatasan waktu akibat tanggung jawab domestik, serta keterbatasan mobilitas. Program pemberdayaan UMKM harus mempertimbangkan aspek inklusi gender, misalnya dengan penyediaan skema kredit mikro khusus perempuan tanpa agunan, pelatihan dengan jadwal fleksibel, serta fasilitas pendukung seperti *day-care* saat kegiatan pelatihan berlangsung. Dengan pendekatan ini, potensi perempuan sebagai motor UMKM dapat dioptimalkan untuk mempercepat transformasi ekonomi lokal. Dua contoh baik pemberdayaan peran perempuan dalam UMKM dapat dilihat pada kegiatan *Scale-Up Womanpreneur* melalui pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi KWT dan UMKM di Kecamatan Ambarawa, serta pada strategi *scale up* bisnis UMKM Kelompok Wanita Tani berbasis keberlanjutan di Desa Awu-Awu, Purworejo (Haryono et al., 2024; Sofyani et al., 2025). Daerah lain bisa mereplikasi kegiatan tersebut dengan melakukan penyesuaian kepada karakter Masyarakat lokal masing-masing daerah. Kedua kegiatan tersebut mencerminkan bahwa Perempuan memiliki peran krusial dalam industri UMKM.

Kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi. Selama ini, program pemberdayaan UMKM seringkali terfragmentasi antar-OPD tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, banyak program berjalan paralel tanpa sinergi, bahkan tumpang tindih. Kurangnya sinergitas terkait pembagian tupoksi dan kewenangan antar dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM akan menghambat pertumbuhan UMKM itu sendiri (Purba, 2018). Pelatihan kewirausahaan dapat diberikan oleh dinas koperasi, sementara bantuan modal dapat disalurkan oleh dinas perdagangan, namun keduanya tidak terhubung dalam satu sistem monitoring. Fragmentasi ini menurunkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Solusi yang dibutuhkan adalah pembentukan satu *task force* atau forum koordinasi lintas-OPD khusus UMKM yang bekerja dengan basis data terpadu, sehingga setiap intervensi yang dilakukan dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, tata kelola pendataan menjadi masalah klasik yang memperburuk situasi. Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2023 silam pernah menggandeng BPS untuk melakukan pendataan lengkap untuk koperasi dan UMKM (BPS, 2023). Namun jika dilakukan pencarian di situs web BPS pun, masih minim data UMKM utamanya untuk level Kabupaten/Kota. Hal ini menyulitkan perencanaan berbasis bukti, baik untuk kebijakan, riset, maupun intervensi program. Tanpa data yang terintegrasi,



sulit untuk menentukan arah kebijakan UMKM kedepannya. Oleh karena itu, pembangunan sistem data terpadu UMKM yang dapat diakses lintas sektor menjadi sangat mendesak. Sistem ini tidak hanya merekam jumlah usaha, tetapi juga profil pelaku, skala produksi, kebutuhan modal, kapasitas tenaga kerja, serta indikator keberhasilan (misalnya omzet, akses pasar, atau sertifikasi yang dimiliki).

Keterkaitan antar-dimensi juga perlu dianalisis lebih dalam. Misalnya, memperluas akses pembiayaan tanpa memperkuat literasi keuangan justru berisiko menimbulkan kredit macet. Demikian pula, digitalisasi tanpa sertifikasi mutu produk tidak akan membuka akses pasar modern. Hal ini menunjukkan bahwa setiap intervensi kebijakan harus didesain secara simultan, saling melengkapi, dan dilakukan dalam urutan yang tepat. Program literasi keuangan dapat dipadukan dengan skema kredit kecil bersyarat, sementara digitalisasi dapat dikombinasikan dengan fasilitasi sertifikasi produk. Meskipun pada dasarnya kelima dimensi tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain jika dilihat secara holistik. Dengan pendekatan integratif, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan dan program kerja seperti pelatihan dan sosialisasi tidak hanya memperbaiki satu aspek, tetapi juga memperkuat rantai nilai UMKM Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan.

Dari perspektif risiko implementasi, beberapa tantangan perlu diantisipasi. Pertama, resistensi pelaku UMKM terhadap perubahan kebiasaan lama. Banyak pelaku UMKM merasa nyaman dengan pola usaha tradisional meski kurang menguntungkan. Contoh kejadian bisa dilihat di Kabupaten Sumenep Ketika program pemberdayaan modal usaha pemerintah kabupaten mendapatkan resistensi (*Adhiyah, 2018*). Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi perubahan yang melibatkan figur lokal terpercaya. Kedua, keterbatasan kapasitas birokrasi dalam merancang program berbasis hasil. Tanpa peningkatan kapasitas aparatur dalam aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi, program UMKM akan cenderung menjadi formalitas tahunan. Ketiga, risiko distorsi pasar akibat intervensi yang tidak tepat sasaran. Misalnya, pemberian subsidi tanpa mekanisme seleksi yang jelas berpotensi hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah relatif mapan. Oleh karena itu, mekanisme targeting, transparansi, dan akuntabilitas harus diperkuat.

Terakhir, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan transformasi UMKM di Minahasa Utara sangat bergantung pada sinergi multi-aktor. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator regulasi dan penyedia infrastruktur dasar. Lembaga keuangan menyediakan modal dengan instrumen inovatif yang sesuai dengan karakter usaha mikro. Akademisi dan lembaga pelatihan bertugas meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, sementara sektor swasta — hotel, restoran, retail, BUMN — menjadi mitra pasar yang menyerap produk UMKM. Di sisi lain, komunitas lokal berfungsi sebagai agen implementasi dan pengawas sosial. Dengan tata kelola kolaboratif ini, ekosistem UMKM dapat tumbuh lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Tantangan UMKM di Minahasa Utara bersifat sistemik, kompleks, dan saling terkait. Solusinya tidak bisa parsial, melainkan harus berupa pendekatan holistik yang menyatukan aspek pembiayaan, literasi, digitalisasi, diversifikasi produk, dan kemitraan dalam satu kerangka besar pembangunan ekonomi daerah. Hanya dengan cara ini, UMKM dapat benar-benar naik kelas, berkontribusi signifikan terhadap PDRB, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.



PENUTUP

Kesimpulan

Dengan mempertemukan pandangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini BRIDA Minahasa Utara, dan berdasarkan studi literatur dan telaah dokumen, strategi untuk pengembangan UMKM supaya lebih cepat naik kelas, dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, yaitu:

1. Pembentukan satu task force atau forum koordinasi lintas-OPD khusus UMKM yang bekerja dengan basis data terpadu, sehingga setiap intervensi yang dilakukan dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan secara berkelanjutan;
2. Pembangunan sistem data terpadu UMKM yang dapat diakses lintas sektor, tidak hanya merekam jumlah usaha, tetapi juga profil pelaku, skala produksi, kebutuhan modal, kapasitas tenaga kerja, serta indikator keberhasilan (misalnya omzet, akses pasar, atau sertifikasi yang dimiliki);
3. Setiap intervensi kebijakan Pemkab Minahasa Utara harus didesain secara simultan, saling melengkapi, dengan pendekatan integratif, dan dilakukan dalam urutan yang tepat akan memperkuat rantai nilai UMKM Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan;
4. Sinergi multi-aktor antara Pemkab Minahasa Utara yang berperan sebagai fasilitator regulasi dan penyedia infrastruktur dasar, dengan lembaga keuangan yang menyediakan modal dengan instrumen inovatif yang sesuai dengan karakter usaha mikro, akademisi dan lembaga pelatihan bertugas meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta dengan sektor swasta yang menjadi mitra pasar yang menyerap produk UMKM;
5. Pendekatan holistik secara konsisten yang menyatukan aspek pembiayaan, literasi, digitalisasi, diversifikasi produk, dan kemitraan dalam satu kerangka besar pembangunan ekonomi daerah sehingga UMKM dapat benar-benar naik kelas, berkontribusi signifikan terhadap PDRB, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyusun kebijakan secara terpadu untuk memudahkan pembiayaan melalui berbagai skema inovatif serta memperkuat lembaga pendukung agar UMKM, termasuk di wilayah pedesaan, lebih mudah memperoleh modal usaha.
2. Mengembangkan pelatihan terstruktur dengan penekanan pada keterampilan manajerial, pencatatan keuangan, literasi digital, serta pengelolaan usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM.
3. Mendorong perluasan pemasaran melalui platform digital, *e-commerce*, dan *e-marketplace* lokal, disertai dukungan branding, dan promosi oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pelaku usaha besar *e-commerce/e-marketplace* serta *influencer* lokal.
4. Melakukan riset pasar pada produk-produk unggulan dalam rangka mendorong diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan *marketshare* produk.
5. Membangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas melalui inkubasi usaha, sistem data terpadu, serta program yang sensitif terhadap konteks sosial dan pemberdayaan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggreyorina, A., Rohendi, A. And Rinawati, R., 2024. Optimalisasi Digital Marketing Mix Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kost Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), Pp.374-382.
- Adhiyah, D.E.F., 2018. Resistensi Umkm Atas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep Dalam Pemberdayaan Modal Usaha Sistem Pusyar Ib Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 6(01), Pp.43-53.
- Badan Pusat Statistik (Bps). 2023. *Kemenkopukm Gandeng Bps Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi Dan Umkm 2023*, Bps.Go.Id. Available At: <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html> (Accessed: September 9, 2025).
- Badan Pusat Statistik (Bps). 2024. Profil Industri Mikro Dan Kecil Provinsi Sulawesi Utara 2023.
- Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Brin). 2025. *Indeks Daya Saing Daerah (Idsd)*, Brin. Available At: <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah> (Accessed: September 9, 2025).
- Fitri, R., 2024. Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Umkm. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(2).
- Gonta, M., Rorong, A. And Londa, V., 2023. Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di Bank Sulawesi Utara Dan Gorontalo Cabang Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), Pp.328-338.
- Karamoy, H., Tirayoh, V. And Morasa, J., 2022. Ekonomi Kreatif Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Pada Umkm Di Kelurahan Sarongsong 1 Kec. Aimadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(3), Pp.113-119.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2024. *Bersyukur, Pelaku Umkm Non Muslim Manado Dapat Sertifikasi Halal*, Wapresri.Go.Id. Available At: <https://www.wapresri.go.id/Bersyukur-Pelaku-Umkm-Non-Muslim-Manado-Dapat-Sertifikasi-Halal/> (Accessed: September 9, 2025).
- Khairani, S. And Pratiwi, R., 2018. Peningkatan Omset Penjualan Melalui Diversifikasi Produk Dan Strategi Promosi Pada Umkm Kerajinan Souvenir Khas Palembang. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), Pp.36-43.
- Kristin, O.V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F. And Sebastian, A., 2024. Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Mangero, M. (2024) *Likupang Jadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kemenparekraf Ri*, Radio Republik Indonesia. Available At: <https://rri.co.id/wisata/1041748/likupang-jadi-destinasi-pariwisata-super-prioritas-kemenparekraf-ri> (Accessed: September 9, 2025).
- Manullang, D.R., Afnita, V., Arsana, I.K.S., Hutahaeen, L.A., Hs, S.R., Wantah, E., Dame, J.M. And Dolonseda, H.P., 2025. Pkm: Pelatihan Pengelolaan Bumdes Dan Umkm Di Desa Wori Minahasa Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), Pp.16-28.

- Najoan, M., Rares, J. And Laloma, A., 2022. Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha Oleh Bank Bri Melalui Kredit (Kur) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(115).
- Onibala, N., Kaparang, V., Putri, A.P. And Alhasni, R.A., 2025. Empowerment Of Micro, Small And Medium Enterprises In Budo Tourism Village, North Minahasa Regency: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Wisata Budo Kabupaten Minahasa Utara. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), Pp.1099-1108.
- Ponomban, D.P., Soegoto, A.S. And Lintong, D.C.A., 2023. Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Pada Umkm Dapur Hot Di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), Pp.695-706.
- Purba, G.M., 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(04), Pp.191-200.
- Robot, J.A.M., 2024. *Desain Laporan Keuangan Berbasis Microsoft Excel Pada Bumdes Sinar Usaha Desa Budo Kabupaten Minahasa Utara* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Manado).
- Silaban, D.P., Tindi, R.G. And Chandra, V., Digital Marketing Pada Umkm Di Sulawesi Utara: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis.
- Sofyani, H., Darsono, S.N.A.C., Amalia, R., Arundaya, F.A. And Putra, A.Z., 2025. Strategi Scale Up Bisnis Umkm Kelompok Wanita Tani Berbasis Sustainability Di Desa Awu-Awu Purworejo. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 6(2), Pp.55-69.
- Subardjo, A. And Rahmawati, M.I., 2022. Inovasi Model Bisnis Inkubasi Dan Kolaborasi Dalam Meningkatkan Kinerja Umkm Surabaya Di Era 4.0. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(1), Pp.17-24.
- Tirayoh, V.Z., Latjandu, L., Taroreh, R. And Taroreh, R., 2024. Umkm Menuju Era Digital Pada Kelompok Umik (Usaha Mikro) Di Desa Wori Kec. Wori Kab. Minahasa Utara: Msmes Towards The Digital Era In The Umik Group (Micro Enterprises) In Wori Village, Wori District, North Minahasa Regency. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(1), Pp.30-36.